



# 2024

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2025**

### **PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)



Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)

**Makassar - 2024**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025**  
**SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

Uraian	Indikator kinerja	2025	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	DIPA TA.2025
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	85%					
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%					

	<p>e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>85%</p> <p>90% (Indeks 3,60)</p>					
<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	<p>DIPA TA.2025</p>

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	DIPA TA.2025
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	DIPA TA.2025
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah - Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara

Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2025
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor :						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Umum - Operasional Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2025
- DIPA 03	94%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan - Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun - Jumlah layanan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu - Persentase putusan yang menggunakan keadilan restorative di Mahkamah Agung	DIPA TA.2025	

	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusah Administrasi	Layanan Sarana Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	DIPA TA.2025
--	---	------	----------------------------	---	-------------------------	--	--------------

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 16 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.